

Analisis Bibliometrik Modus Operandi Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik

Shinthia Saputri*, Lilis Adinda, Sitti Nur Fhadilah, Nova Alvarini, Nita Hasnita

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

Jln. Bunga kamboja, Nomor 79, Kode Pos 93121, Kota Kendari), Indonesia

Email: ^{1,*}shinthiasaputri@gmail.com, ²adindalilis291@gmail.com, ³fhdilahlila@gmail.com,

⁴novaalvarini6@gmail.com, ⁵nitahasnita13@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: shinthiasaputri@gmail.com

Abstrak—Meskipun literatur mengenai akuntabilitas publik telah berkembang pesat, namun kajian komprehensif yang memetakan evolusi intelektual modus operandi kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat terbatas. Dinamika otonomi daerah dan kompleksitas anggaran di Indonesia menciptakan resiko yang terus bertransformasi, namun sintesis sistematis terhadap pola-pola tersebut belum terakomodasi secara integratif dalam peta jalan riset nasional. Penelitian ini mengeksplorasi peta jalan riset ilmiah mengenai modus operandi tersebut melalui pendekatan analisis bibliometrik. Menggunakan data dari 387 publikasi yang terindeks di Crossref (periode 2015-2024), penelitian ini memproses data melalui perangkat lunak Publish or Perish dan memvisualisasikannya dengan VOSviewer. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa diskursus akademik masih berpusat pada sistem pengendalian intern dan peran audit sebagai instrumen utama pencegahan. Namun, terdapat tren signifikan yang mengarah pada penggunaan teori Fraud Pentagon dan integrasi sistem digital seperti SIPD dalam memitigasi risiko. Keterbaruan studi ini terletak pada sintesis literatur selama satu dekade yang menghubungkan aspek teknis akuntansi dengan dinamika politik lokal. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi badan pengawas untuk merancang strategi audit yang lebih prediktif dan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Analisis Bibliometrik ; Kecurangan Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Modus Operandi; Akuntabilitas Publik

Abstract—Despite the extensive literature on public accountability, a comprehensive study mapping the intellectual evolution of fraud modus operandi in local government financial statements remains significantly limited. The dynamics of regional autonomy and budgetary complexities in Indonesia have created evolving risk loopholes, yet a systematic synthesis of these patterns has not been integratively addressed within the national research roadmap. This study explores the scientific research trajectory of such fraudulent schemes through a bibliometric approach. Utilizing data from 387 publications indexed in Crossref (2015-2024), the research processed data using Publish or Perish software and visualized it through VOSviewer. The findings reveal that academic discourse is still centered on internal control systems and the role of auditing as primary preventive instruments. However, there is a significant trend shifting toward the application of the Fraud Pentagon theory and the integration of digital systems, such as the Local Government Information System (SIPD), in mitigating risks. The novelty of this study lies in the ten-year literature synthesis that bridges technical accounting aspects with local political dynamics. These results are expected to serve as a strategic reference for oversight agencies in designing more predictive and technology-based audit strategies.

Keywords: Bibliometric Analysis; Financial Statement Fraud; Local Government; Modus Operandi; Public Accountability

How to Cite: Saputri, S., Adinda, L., Fhadilah, S. N., Alvarini, N., & Hasnita, N. (2026). Analisis Bibliometrik Modus Operandi Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 6(3), 449-456. <https://doi.org/10.47065/jtear.v6i3.2541>

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen krusial yang menyajikan gambaran kondisi serta kinerja ekonomi suatu entitas secara transparan dan akuntabel. (Hidayatulloh & Alamsyah AF, 2024), efektivitas informasi dalam laporan keuangan sangat bergantung pada tingkat reliabilitasnya, di mana munculnya fenomena penyajian kembali laporan keuangan (*financial restatement*) dapat menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2003, pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan publik melalui pendekatan prestasi kerja. Hal ini menuntut adanya sistem informasi yang mampu menyediakan data akurat untuk mengukur kinerja pemerintah guna meminimalisir celah penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Kinerja keuangan daerah yang dikelola dengan jujur bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hasnita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari & Tenggara (2021).

Dalam konteks tata kelola sektor publik, fenomena kecurangan laporan keuangan dapat ditelaah secara mendalam melalui lensa Teori Keagenan (Agency Theory). Teori ini menjelaskan adanya kontrak antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang diberikan mandat untuk mengelola sumber daya publik. Masalah keagenan muncul ketika terjadi asimetri informasi, di mana agen memiliki akses data keuangan yang lebih luas dibandingkan prinsipal, sehingga memberikan ruang bagi oknum untuk melakukan tindakan oportunistik demi kepentingan pribadi atau kelompok melalui manipulasi laporan keuangan. Adanya asimetri informasi ini diperkuat oleh elemen-elemen dalam kerangka Fraud Pentagon, yang menjelaskan bagaimana faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi saling berkaitan dalam menciptakan peluang terjadinya praktik fraudulent financial reporting (Rezianti et al., 2022).

Namun, meskipun regulasi telah diperketat, modus operandi kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan daerah masih terus berkembang. Kecurangan ini sering kali muncul dalam bentuk manipulasi pencatatan pendapatan,

pengelembungan belanja (*mark-up*), hingga penyajian aset yang tidak sesuai kondisi riil. (Sevigo & Lathifah, 2024) menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah yang dikelola dengan jujur bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, penyimpangan melalui berbagai modus operandi justru menciptakan distorsi informasi yang menghambat pembangunan. Fenomena ini diperkuat oleh data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang dirilis oleh BPK, yang mengungkapkan adanya 7.845 permasalahan ketidakpatuhan dengan total dampak finansial mencapai triliunan rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa celah dalam sistem pengendalian intern pemerintah masih sering dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dan menjadi sinyal kuat bahwa celah dalam sistem pengendalian intern pemerintah masih sering dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan secara terstruktur.

Permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan oleh BPK tersebut mencerminkan adanya tantangan sistemik dalam manajemen keuangan daerah di Indonesia. Fenomena ini sering kali diperparah oleh adanya tumpang tindih regulasi yang menciptakan celah interpretasi bagi pengelola anggaran di tingkat daerah. Sebagai contoh, transisi dari sistem pelaporan manual ke digital sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, sehingga menciptakan peluang bagi terjadinya kesalahan material yang bersifat disengaja atau kecurangan. Pengawasan yang lemah sering kali menjadi celah terjadinya manipulasi karena efektivitas sistem pengendalian intern memiliki kaitan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Triono & Dewi, 2020). Selain itu, tekanan eksternal untuk mempertahankan citra kinerja positif dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering kali menjadi variabel signifikan yang memengaruhi intensitas kecurangan laporan keuangan.

Secara teoritis, berbagai faktor pendorong modus operandi tersebut telah dikaji melalui berbagai sudut pandang. (Yulianti et al., 2023) dalam penelitiannya menyoroti bahwa stabilitas keuangan dan tekanan eksternal merupakan variabel signifikan yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan melalui pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Adanya asimetri informasi antara pemerintah (*agen*) dan masyarakat (*prinsipal*) memberikan ruang bagi oknum untuk melakukan tindakan oportunistik.

Mengingat masifnya publikasi ilmiah mengenai topik kecurangan ini, diperlukan sebuah pemetaan komprehensif untuk memahami arah perkembangan riset yang ada. Fenomena kecurangan laporan keuangan seringkali dianalisis melalui kerangka teori Fraud Pentagon, yang menjelaskan bagaimana faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi saling berkaitan dalam menciptakan peluang manipulasi (Carla & Akuntansi, 2021); (Putra & Kusnoegroho YA, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan tekanan eksternal tetap menjadi variabel signifikan pendorong kecurangan di daerah (Rezianti et al., 2022); (Yanti & Riharjo, 2021). Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai langkah preventif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah (Alfani & Nasution J, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bibliometrik terhadap tren publikasi terkait modus operandi kecurangan laporan keuangan daerah di Indonesia periode 2015–2024 dengan menggunakan bantuan perangkat lunak VOSviewer dan basis data Crossref. Studi ini penting untuk mengidentifikasi dominasi kata kunci, kolaborasi antarpeleliti, serta evolusi tema penelitian dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan akuntabilitas publik. Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan arahan teoretis bagi akademisi dan panduan praktis bagi auditor serta pembuat kebijakan dalam membedah pola penyimpangan keuangan di masa depan. Dengan membedah literatur yang berkaitan dengan regulasi dan modus kecurangan, diharapkan kajian ini dapat membantu regulator dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan serta memberikan panduan bagi peneliti selanjutnya untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) yang belum tersentuh, serta kesenjangan literatur dalam domain kecurangan lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis bibliometrik untuk memetakan perkembangan literatur mengenai modus operandi kecurangan laporan keuangan daerah di Indonesia. Analisis bibliometrik dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan gambaran struktur intelektual, tren penelitian dari waktu ke waktu, serta identifikasi jaringan kolaborasi antarpeleliti dalam skala data yang besar. Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan data, pencarian literatur pada basis data digital, penyaringan artikel berdasarkan kriteria tertentu, hingga tahap visualisasi dan interpretasi data menggunakan perangkat lunak bibliometrik.

Desain penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan orientasi eksploratif untuk menggambarkan fenomena perkembangan literatur secara komprehensif. Pendekatan deskriptif diterapkan guna memvisualisasikan distribusi tematik, intensitas publikasi, dan tren temporal tanpa menguji hipotesis kausal antarvariabel. Fokus analisis terpusat pada indikator bibliometrik utama seperti frekuensi kata kunci, kolaborasi penulis, serta densitas hubungan konseptual yang diwakili melalui ukuran node dan jarak antar-kolaborasi dalam peta jaringan. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemetaan struktural yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kebijakan pengawasan keuangan daerah. Pendekatan bibliometrik dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tren literatur dan pemetaan kluster penelitian. Metode ini sangat efektif dalam mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) serta arah perkembangan kajian ilmiah di masa depan (Donthu et al., 2021). Penggunaan analisis bibliometrik juga telah

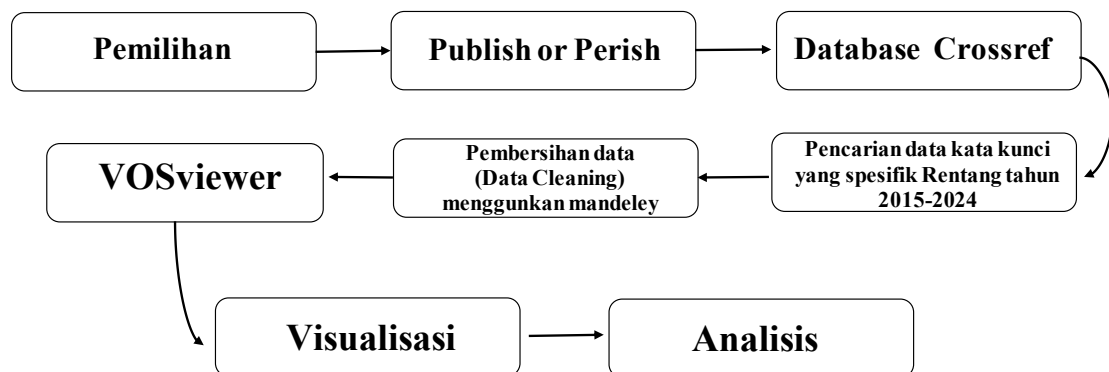
banyak diterapkan untuk memetakan paradigma akuntansi sektor publik dan efektivitas pengendalian internal dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia (Darmawati et al., 2024).

Data sekunder dikumpulkan dari basis data Crossref menggunakan perangkat lunak Publish or Perish versi 8 sebagai instrumen ekstraksi metadata otomatis. Pemilihan basis data Crossref dalam penelitian ini didasarkan pada luasnya cakupan metadata jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan isu tata kelola keuangan di Indonesia (Anne-Wil Harzing, 2021). Data yang dikumpulkan mencakup periode satu dekade (2015-2024) untuk menangkap dinamika perubahan modus operandi kecurangan pasca-implementasi berbagai regulasi akuntabilitas publik terbaru. Crossref dipilih atas pertimbangan standarisasi metadata yang tinggi, akses terbuka terhadap DOI, serta cakupan publikasi yang mencakup jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Proses pencarian menerapkan operator Boolean dengan kombinasi kata kunci "kecurangan laporan keuangan" AND "pemerintah daerah" AND ("modus operandi" OR "fraud pattern") AND akuntabilitas publik, serta variasi istilah dalam bahasa Inggris seperti "financial statement fraud" dan "local government". Periode analisis dibatasi pada publikasi tahun 2015-2024 untuk menangkap siklus satu dekade yang mencerminkan implementasi penuh otonomi daerah pasca-Undang-Undang Keuangan Negara. Batasan waktu ini juga mempertimbangkan data lag indeksasi rata-rata 6-12 bulan pada Crossref, sehingga data tahun 2024 dipastikan telah stabil untuk analisis.

Pengolahan data mengikuti protokol standar bibliometrik melalui tahap berurutan. Tahap awal Deduplikasi yaitu impor metadata ke Mendeley Desktop untuk mendeteksi otomatis rekaman ganda berdasarkan DOI, judul, dan nama penulis, di mana sekitar 12% data awal dieliminasi sebagai replikasi indeksasi. Selanjutnya, verifikasi manual dilakukan terhadap 5% sampel acak guna memastikan autentisitas metadata dan relevansi abstrak dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya Skrining yaitu memverifikasi manual dilakukan untuk memastikan relevansi dengan menerapkan kriteria inklusi-eksklusi yang ketat: publikasi harus berupa artikel jurnal *peer-reviewed*, prosiding konferensi, atau book chapter; memiliki relevansi topik minimal 70%; serta kelengkapan metadata kata kunci. Data yang memenuhi syarat dipindahkan ke Microsoft Excel 365 untuk tabulasi variabel. Proses ini menghasilkan data bersih berisi 387 publikasi yang siap dianalisis menggunakan VOSviewer.

Analisis bibliometrik utama dijalankan melalui VOSviewer versi 1.6.20 dengan algoritma visualisasi *Best Heuristic* untuk mengelompokkan kata kunci berdasarkan kemunculan bersama (*co-occurrence*). Guna menjaga ketajaman analisis dan meminimalisir gangguan data (*noise*), peneliti menetapkan ambang batas minimum kemunculan istilah sebanyak 10 kali. Dari total 14.584 istilah, terdapat 416 istilah yang memenuhi syarat untuk diproses ke dalam visualisasi jaringan. *Network Visualization* Mengukur kekuatan hubungan antar-simpul menggunakan bobot link sebesar 0,25. *Overlay Visualization* Menerapkan skala warna biru-kuning untuk menandai perkembangan temporal berdasarkan rata-rata tahun publikasi per simpul. *Density Visualization* Mengukur intensitas riset melalui gradasi cahaya, di mana area kuning terang menunjukkan topik jenuh seperti "internal control system", sementara zona dengan warna redup mengindikasikan research gap pada aspek seperti "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah".

Kerangka konseptual penelitian divisualisasikan pada Gambar 1 yang menggambarkan alur transformasi dari data bibliografi mentah menuju pemetaan intelektual. Input berupa metadata Crossref melalui Publish or Perish mengalir ke proses pembersihan Mendeley-Excel, kemudian dianalisis oleh VOSviewer untuk menghasilkan tiga output utama: struktur kluster, tren temporal, dan kepadatan tematik. Hubungan kausal antarvariabel ditunjukkan melalui panah berarah yang menghubungkan tahap pengolahan dengan indikator bibliometrik, dengan "modus operandi kecurangan" sebagai variabel sentral yang mengikat kluster regulasi, pengendalian, dan stabilitas keuangan. Gambar 1. Kerangka konseptual analisis bibliometrik



Gambar 1. Kerangka Konseptual Analisis Bibliometrik

Seluruh proses analisis ini dilakukan secara objektif dan transparan untuk meminimalkan bias peneliti, sehingga hasil pemetaan yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai peta jalan penelitian kecurangan laporan keuangan daerah di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup analisis deskriptif terhadap fluktuasi jumlah publikasi

tahunan untuk mengukur tingkat minat akademisi terhadap isu akuntabilitas dan *fraud*. Setiap temuan visual dari VOSviewer kemudian dikaitkan dengan konteks nyata fenomena akuntansi sektor publik di Indonesia, termasuk pengaruh perubahan kebijakan pengawasan dari pemerintah pusat yang mungkin memengaruhi pola-pola penyimpangan keuangan di daerah. Dengan mengintegrasikan analisis bibliometrik dan tinjauan kontekstual ini, metode penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang solid bagi pengembangan literatur akuntansi dan auditing secara lebih sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil analisis data yang telah diolah menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan Publish or Perish. Hasil penelitian dibagi menjadi beberapa sub-bahasan utama, yaitu perkembangan jumlah publikasi tahunan, pemetaan jaringan kata kunci (co-occurrence), analisis tren perkembangan topik (overlay visualization), serta analisis kepadatan topik (density visualization). Seluruh temuan visual tersebut kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk memahami bagaimana modus operandi kecurangan laporan keuangan daerah dipelajari dalam literatur akademis di Indonesia selama satu dekade terakhir. Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel 365, volume publikasi mengenai modus operandi kecurangan laporan keuangan daerah menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Distribusi Tahunan Publikasi Dan Intensitas Sitasi (2015-2024)

Kata Kunci adalah “Kecurangan Laporan Keuangan Daerah”			
Tahun	Jumlah Publikasi (n)	Persentase Publikasi	Jumlah Sitasi
2015	6	1,50%	30.225
2016	12	2,99%	60.480
2017	22	5,59%	112.295
2018	22	5,59%	113.008
2019	40	10,39%	209.976
2020	43	10,99%	222.200
2021	50	13,00%	262.730
2022	60	15,41%	311.388
2023	72	18,62%	376.278
2024	60	15,92%	321.816
Total	387	100,00%	2.021.053

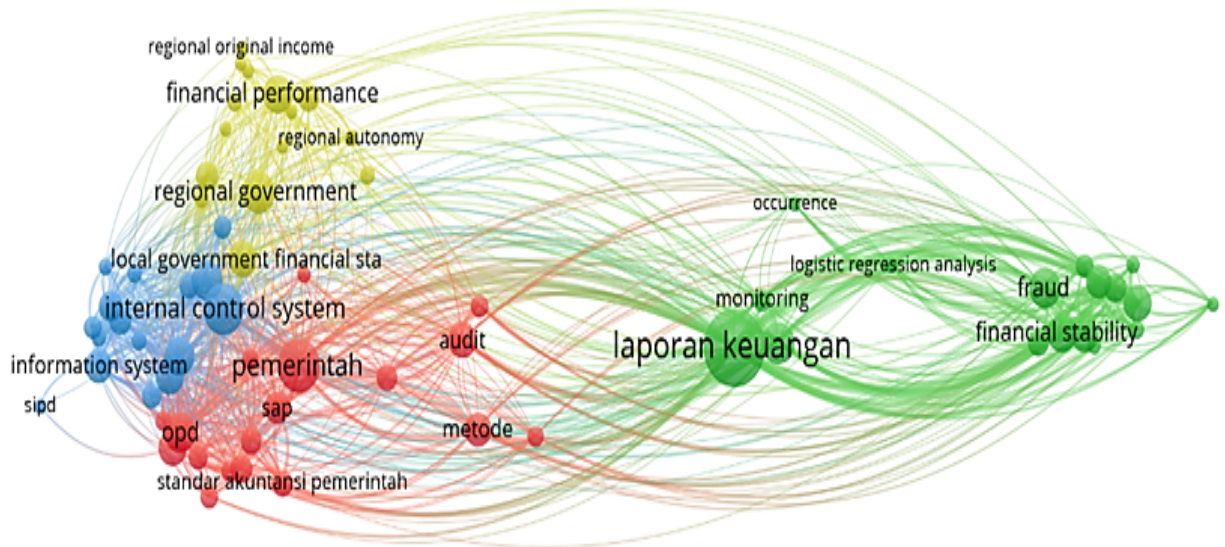
Data yang tersaji dalam Tabel 1 memberikan gambaran longitudinal mengenai bagaimana isu kecurangan laporan keuangan daerah menjadi perhatian serius bagi akademisi di Indonesia. Jika dianalisis lebih tajam, periode 2015-2017 yang menunjukkan angka publikasi rendah dalam Tabel 1 dapat diinterpretasikan sebagai fase "penyesuaian regulasi". Pada masa ini, pemerintah daerah masih berfokus pada peralihan teknis penggunaan sistem akuntansi dari basis kas menuju akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010. Minimnya publikasi mengenai modus kecurangan pada tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa perhatian peneliti masih terserap pada bagaimana entitas dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar, bukan pada pendeteksian pola-pola manipulasi yang sistemik.

Eskalasi signifikan yang teramati pasca-2018 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan kontribusi 18,62% (72 publikasi) mencerminkan transformasi paradigma riset yang lebih progresif. Fenomena ini berkorelasi positif dengan penguatan transparansi data publik, di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi objek observasi empiris yang lebih aksesibel. Para peneliti mulai mengeksplorasi anomali antara capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan fakta-fakta praktik kecurangan yang masih ditemukan, sehingga mendorong lahirnya analisis yang lebih kritis terhadap integritas laporan keuangan daerah.

Tingginya akumulasi intensitas sitasi yang mencapai angka 2.021.053 menegaskan bahwa topik ini merupakan *core subject* dengan tingkat relevansi yang sangat tinggi dalam literatur akuntansi sektor publik. Selain itu, tren pada periode 2023-2024 mengindikasikan adanya pergeseran fokus menuju *preventif*-digital, seiring dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meskipun terdapat sedikit fluktuasi jumlah publikasi di akhir periode yang disebabkan oleh faktor time-lag indeksasi pada basis data Crossref, antusiasme riset tetap menunjukkan tren positif. Peneliti kini lebih condong mengevaluasi efektivitas digitalisasi dalam mempersempit ruang gerak kecurangan sekaligus mewaspadaai kemunculan pola penyimpangan baru berbasis teknologi informasi.

Analisis deskriptif melalui Tabel 1 ini juga memberikan sinyal kuat bahwa modus operandi kecurangan yang diteliti semakin beragam. Pada awal tahun di tabel tersebut, fokus utama riset mungkin hanya terbatas pada penyalahgunaan aset, namun di tahun-tahun akhir, fokus riset mulai merambah ke aspek yang lebih abstrak namun krusial, seperti budaya organisasi, tone at the top, dan perilaku tidak etis birokrasi. Dengan demikian, Tabel 1 bukan

sekadar kumpulan angka, melainkan cermin evolusi pemikiran para akademisi dalam upaya membongkar tabir kecurangan demi terciptanya akuntabilitas publik yang hakiki di tingkat daerah.



Gambar 1. Network visualization bibliometrik variabel kecurangan laporan keuangan daerah

Hasil network visualization mengelompokkan kata kunci penelitian ke dalam empat klaster utama yang merepresentasikan domain bahasan berbeda dalam studi kecurangan laporan keuangan daerah.

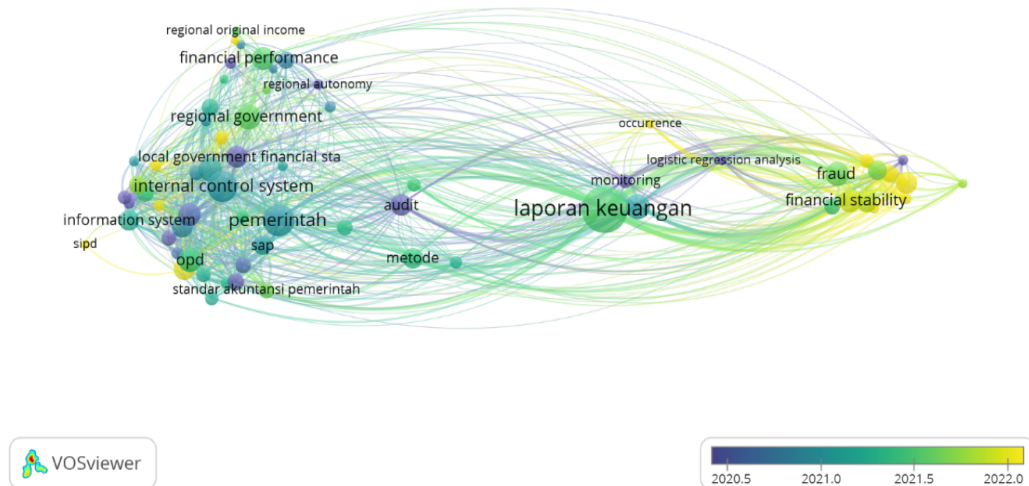
Klaster pertama yang ditandai dengan warna merah menitikberatkan pada aspek regulasi dan prosedur formal dalam birokrasi pemerintahan daerah. Terminologi dominan seperti "pemerintah", "audit", "standar akuntansi pemerintah (SAP)", dan "opd" (Organisasi Perangkat Daerah) mengindikasikan bahwa sebagian besar literatur awal berfokus pada kepatuhan terhadap aturan normatif sebagai instrumen pencegahan kecurangan. Keterhubungan yang kuat antara "pemerintah" dan "audit" menegaskan peran strategis auditor dalam mendeteksi penyimpangan keuangan, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya transparansi publik melalui pemeriksaan eksternal. Temuan ini menunjukkan bahwa fokus riset di Indonesia masih didominasi oleh aspek kepatuhan formal. Namun, jika ditinjau lebih dalam, integrasi kerangka *Fraud Pentagon* dalam literatur Indonesia saat ini mulai menunjukkan evolusi pemahaman bahwa kecurangan tidak lagi dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara stabilitas keuangan dan tekanan eksternal.

Pergeseran metodologis menuju penggunaan *logistic regression analysis* yang terpantau signifikan pada tren tahun 2022 menunjukkan upaya akademisi untuk membangun model deteksi yang lebih presisi dan prediktif. Secara global, penggunaan teknologi analitik ini sejalan dengan kebutuhan sektor publik untuk melakukan pengawasan proaktif melalui Big Data *Analytics* guna mengidentifikasi anomali transaksi sebelum laporan keuangan diterbitkan (Arnaboldi et al., 2015).

Klaster kedua yang berwarna hijau merepresentasikan dimensi psikologis dan stabilitas ekonomi dalam fenomena kecurangan. Munculnya kata kunci "fraud", "financial stability", dan "monitoring" dalam klaster ini menunjukkan adanya pergeseran fokus riset ke arah determinan penyebab kecurangan. Hal ini selaras dengan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang menempatkan stabilitas keuangan sebagai tekanan (*pressure*) yang mendorong agen untuk melakukan manipulasi laporan demi mempertahankan citra kinerja. Selain itu, adanya istilah "logistic regression analysis" di klaster ini menandakan bahwa metodologi penelitian yang dominan digunakan dalam menguji modus operandi kecurangan adalah pendekatan kuantitatif statistik yang ketat.

Klaster ketiga (biru) menyoroti aspek infrastruktur teknis dan preventif melalui "internal control system", "information system", dan "sipd". Peneliti mengidentifikasi bahwa integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi variabel kunci dalam memitigasi risiko manipulasi data finansial. Keberadaan simpul "internal control system" yang cukup besar menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) masih menjadi topik krusial dalam diskusi akademis untuk menutup celah modus operandi seperti mark-up atau penggelapan aset.

Terakhir, klaster keempat yang berwarna kuning berfokus pada luaran kinerja daerah dengan istilah seperti "financial performance", "regional government", dan "regional autonomy". Keterkaitan antara otonomi daerah dan kinerja keuangan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal membawa tantangan tersendiri dalam pengawasan akuntabilitas laporan keuangan daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, Gambar 1 membuktikan bahwa riset kecurangan di Indonesia telah berkembang dari sekadar pemenuhan regulasi menuju analisis yang lebih kompleks yang melibatkan teknologi informasi, stabilitas keuangan, dan efektivitas pengawasan internal.



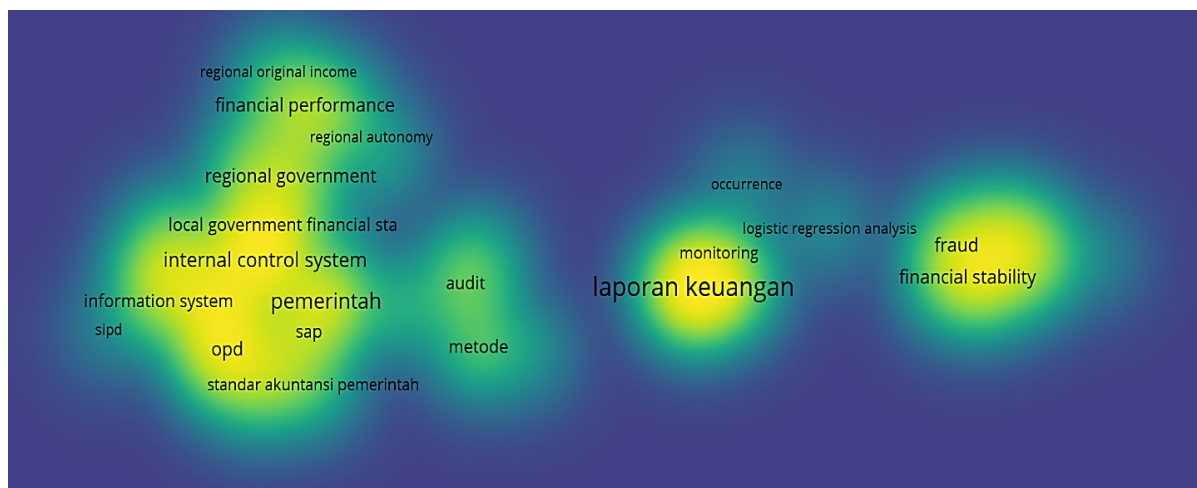
Gambar 2. Visualisasi tren (overlay visualization) perkembangan topik riset kecurangan laporan keuangan

Analisis dinamika temporal dalam riset kecurangan laporan keuangan di Indonesia disajikan melalui overlay visualization pada Gambar 2, yang memberikan perspektif kronologis mengenai evolusi topik penelitian.

Topik-topik awal (sekitar tahun 2020) ditandai dengan warna biru tua hingga hijau kebiruan, seperti "internal control system", "pemerintah", dan "standar akuntansi pemerintah". Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama akademisi pada periode tersebut masih terkonsentrasi pada penguatan infrastruktur tata kelola dan kepatuhan regulasi sebagai instrumen dasar mitigasi kecurangan. Dominansi "internal control system" mengonfirmasi bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan daerah..

Memasuki periode transisi menuju tahun 2021, visualisasi menunjukkan munculnya tren baru yang ditandai dengan warna hijau terang hingga kuning. Istilah-istilah seperti "*financial stability*", "*fraud*", "*monitoring*", dan "*occurrence*" mulai mendominasi diskursus ilmiah. Pergeseran ini menandakan bahwa arah penelitian mulai beralih pada eksplorasi variabel-variabel penekan yang memicu terjadinya kecurangan secara empiris. Munculnya "*financial stability*" sebagai topik yang lebih baru selaras dengan pengembangan teori *fraud* pentagon, di mana stabilitas keuangan entitas sering kali menjadi stimulus bagi oknum untuk melakukan tindakan manipulatif guna mempertahankan opini audit yang baik dari BPK.

Kebaruan penelitian paling mutakhir, yang direpresentasikan oleh simpul berwarna kuning terang pada periode 2022, menonjolkan penggunaan "*logistic regression analysis*" sebagai instrumen uji statistik yang dominan. Fenomena ini menunjukkan bahwa metodologi riset di Indonesia telah berkembang ke arah pengujian model prediksi kecurangan yang lebih presisi. Selain itu, munculnya istilah "sipd" (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan warna yang cenderung lebih terang mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah menjadi isu krusial yang baru dalam upaya menutup celah modus operandi kecurangan di masa depan. Secara keseluruhan, Gambar 2 membuktikan adanya konsistensi antara perkembangan regulasi keuangan negara dengan fokus kajian akademisi yang semakin spesifik dan teknis.



Gambar 3. Visualisasi Kepadatan (Density Visualization) Intensitas Riset Modus Operandi kecurangan

Meskipun implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 ditujukan sebagai instrumen preventif, analisis density visualization mengungkap research gap yang

signifikan. Kajian ilmiah mengenai efektivitas digitalisasi ini masih sangat terbatas, sehingga sistem teknologi informasi belum terekplorasi sepenuhnya sebagai benteng pertahanan terhadap modus operandi konvensional seperti manipulasi pendapatan. Rendahnya literatur pada aspek digital mempertegas risiko asimetri informasi antara pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Tanpa integrasi teknologi mutakhir seperti Machine Learning atau Blockchain, celah bagi tindakan oportunistik akan tetap terbuka.

Fenomena rendahnya kepadatan riset pada aspek digitalisasi keuangan sejalan dengan masih dominannya penelitian yang berfokus pada deteksi kecurangan melalui elemen konvensional dalam kerangka fraud pentagon (Putra & Kusnoegroho YA, 2021). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) bagi pengembangan sistem pelaporan keuangan berbasis digital di masa depan. Kondisi ini krusial mengingat efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) berkorelasi langsung dengan kualitas laporan keuangan daerah, di mana pengawasan yang lemah sering kali menjadi pintu masuk manipulasi (Triono & Dewi, 2020). Selain itu, pengujian melalui kerangka fraud pentagon mengonfirmasi bahwa faktor eksternal dan tata kelola yang tidak memadai tetap menjadi pendorong signifikan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (Putra & Kusnoegroho YA, 2021); (Luhri et al., 2021).

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 3, konsentrasi penelitian terbesar di Indonesia terpusat secara masif pada variabel "laporan keuangan", "internal control system", dan "pemerintah". Saturasi tinggi pada simpul "internal control system" menunjukkan konsensus kuat peneliti mengenai peran SPI sebagai garda terdepan mitigasi kecurangan. Begitu pula dengan variabel "pemerintah" dan "opd", tingkat kepadatannya mencerminkan fokus riset yang masih sangat bersifat kelembagaan dan prosedural.

Di sisi lain, terdapat area dengan pendaran warna yang jauh lebih lemah dan tersebar di pinggiran peta, seperti "regional original income" (PAD), "local government financial stability", dan "sipd". Rendahnya kepadatan pada topik "sipd" menunjukkan bahwa meskipun sistem telah diimplementasikan, kajian ilmiah spesifik yang membedah dampaknya terhadap pencegahan kecurangan masih sangat langka. Secara keseluruhan, pemetaan ini tidak hanya mengonfirmasi dominasi variabel klasik dalam literatur akuntansi sektor publik, tetapi juga membuktikan kebutuhan akan riset baru yang lebih adaptif terhadap transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah guna mempersempit ruang gerak modus operandi kecurangan

3.2 Pembahasan

Hasil analisis bibliometrik dalam penelitian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa kajian mengenai modus operandi kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia berkembang secara signifikan dan multidimensional, seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah. Pemetaan struktur intelektual menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI), kepatuhan regulasi, dan peran audit merupakan tema dominan yang saling terhubung, sehingga memperkuat asumsi bahwa kelemahan tata kelola masih menjadi akar utama terjadinya modus operandi kecurangan di pemerintahan daerah. (Pujanira & Taman, 2017); Faadillah Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Konsentrasi kepadatan riset pada variabel sistem pengendalian intern (SPI) menunjukkan konsensus akademisi bahwa kelemahan sistem pengendalian membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan (Sevigo & Lathifah, 2024) Namun, hasil overlay visualization menunjukkan pergeseran tren penelitian menuju arah faktor stabilitas keuangan dan pendekatan statistik prediktif, seperti regresi logistik. Munculnya variabel *financial stability* dan *pressure* (tekanan) pada periode 2021-2022 mendukung teori keagenan (*agency theory*), di mana tekanan eksternal menciptakan ruang bagi oknum untuk memanipulasi citra kinerja ekonomi

Di sisi lain, rendahnya kepadatan riset pada topik digitalisasi sistem keuangan, khususnya SIPD, menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan (Hidayatulloh & Alamsyah AF, 2024) Meskipun SIPD dimaksudkan sebagai instrumen preventif, posisi variabel ini yang berada di pinggiran peta kepadatan (*density visualization*) membuktikan bahwa efektivitasnya dalam mencegah kecurangan belum banyak dieksplorasi secara ilmiah (Bisnis et al., 2024). Hal ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti Machine Learning untuk deteksi anomali otomatis atau Blockchain untuk menjamin immutabilitas data (Bertomeu et al., 2021)

Secara metodologis, riset kecurangan di Indonesia telah berevolusi dari sekadar pelaporan deskriptif menuju pengembangan model prediksi yang lebih presisi melalui *logistic regression analysis*. Pergeseran ini menandakan bahwa peneliti kini lebih fokus pada pencegahan proaktif. Dominansi topik SPI sebagai area jenuh mengonfirmasi bahwa kelemahan kontrol merupakan faktor universal, namun ketergantungan pada prosedur audit konvensional perlu ditinjau kembali melalui lensa transformasi digital agar tidak terjebak pada kepatuhan administratif semata tanpa menyentuh substansi pencegahan korupsi secara mendalam (Daley, 2009).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil memetakan tren riset, struktur intelektual, dan arah perkembangan kajian kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia periode 2015-2024 melalui analisis bibliometrik terhadap 387 publikasi ilmiah. Hasil visualisasi jejaring menunjukkan dominasi tema sistem pengendalian intern, kepatuhan regulasi, kualitas laporan keuangan, dan peran audit sebagai instrumen utama pencegahan, sekaligus mengonfirmasi kelemahan tata kelola sebagai akar masalah utama. Meskipun demikian, studi ini menemukan pergeseran fokus riset yang mulai

mengeksplorasi faktor stabilitas keuangan daerah dan tekanan kinerja melalui lensa Fraud Pentagon, serta pemanfaatan pendekatan statistik prediktif dalam mengidentifikasi risiko kecurangan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis jaringan dan tren temporal untuk mengidentifikasi kesenjangan literatur (research gap), khususnya pada minimnya kajian yang membahas peran digitalisasi sistem keuangan, termasuk implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagai instrumen preventif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui pemetaan literatur yang komprehensif, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi auditor dan regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis risiko digital. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan satu basis data utama, yaitu Crossref, yang berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan publikasi relevan, serta karakteristik analisis bibliometrik yang berfokus pada metadata sehingga belum menggambarkan secara mendalam konteks empiris masing-masing penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data, menggabungkan pendekatan bibliometrik dengan metode empiris atau kualitatif, serta mengeksplorasi secara lebih spesifik efektivitas transformasi digital, tata kelola keuangan, dan mekanisme pengendalian dalam menekan modus operandi kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan demi menjaga kepercayaan masyarakat.

REFERENCES

- Alfani, D., & Nasution J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 11158–11365.
- Anne-Wil Harzing. (2021). *Harzing, A. W. (2007). Publish Or Perish Software... - Google Scholar.* <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/faam.12049>
- Arnaboldi, M., Lapsley, I., & Steccolini, I. (2015). Performance Management In The Public Sector: The Ultimate Challenge. *Financial Accountability & Management*, 31(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/faam.12049>
- Bertomeu, J., Cheynel, E., Floyd, E., & Pan, W. (2021). Using Machine Learning To Detect Misstatements. *Review Of Accounting Studies*, 26(2), 468–519. <https://doi.org/10.1007/s11142-020-09563-8>
- Bisnis, J., Sains, D., Yulianty, D., & Hayat, U. S. (2024). *Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud.* <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/bes>
- Carla, C., & Akuntansi, S. P.-U. A. J. I. (2021). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Fraud Pentagon. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v3i1.481>
- Daley, D. M. (2009). Interdisciplinary Problems And Agency Boundaries: Exploring Effective Cross-Agency Collaboration. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 19(3), 477–493. <https://doi.org/10.1093/jopart/mun020>
- Darmawati, Mediawati, E., & Rasyid, S. (2024). New Trends And Directions In Local Government Finance Research: A Bibliometric Analysis. *Public And Municipal Finance*, 13(1), 137–149. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.11)
- Donthu, N., Kumar, S., & Mukherjee, D. (2021). How To Conduct A Bibliometric Analysis: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Faadillah Herindraningrum, F., & Yuhertiana, I. (2021). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review.* 12(2).
- Hasnita Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, N., & Tenggara, S. (2021). *Jurnal Indonesia Sosial Sains Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari.* <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Hidayatulloh, M., & Alamsyah Af. (2024). Analisis Trend Financial Restatement: Studi Bibliometrik Dengan Vosviewer. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 5(1), 73–81. <https://doi.org/10.47065/jtear.v5i1.1383>
- Luhri, A. S. R. N., Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.35912/jakman.v3i1.481>
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. In *Riset Akuntansi Dan Manajemen* (Vol. 6, Number 2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Putra, A., & Kusnoegroho Ya. (2021). Pengujian Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Afre (Accounting And Financial Review)*, 4(2), 172–185. <https://doi.org/10.26905/af.v4i2.6269>
- Rezianti, M. A., Astuti, S. W., & Wicaksono, A. P. N. (2022). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 471–490. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.43463>
- Sevigo, A. E., & Lathifah, N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 4(3), 715–724. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1192>
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* (Vol. 21, Number 01). Stie Aas Surakarta. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>
- Yanti, L. D., & Riharjo, I. B. (2021). Pendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan Menggunakan Fraud Pentagon Theory. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10(5). <https://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3986>
- Yulianti, V., Sulistyorini Wulandari, D., & Sopiha, S. (2023). Analisis Stabilitas Keuangan Dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Pendekatan Teori Keagenan. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 3(4), 519. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.643>